

**PANGGILAN MEWUJUDKAN *BONUM COMMUNE*:
KETERLIBATAN KAUM AWAM KEUSKUPAN
BANDUNG DALAM BIDANG POLITIK**

TESIS



Oleh:

**STEPHANUS AUGUSTA YUDHIANTORO
2017861007**

**Pembimbing Tunggal
Dr. Theol. Leonardus Samosir, OSC**

**PROGRAM MAGISTER ILMU TEOLOGI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
AGUSTUS 2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PANGGILAN MEWUJUDKAN *BONUM COMMUNE*:
KETERLIBATAN KAUM AWAM KEUSKUPAN
BANDUNG DALAM BIDANG POLITIK**



Oleh:

**STEPHANUS AUGUSTA YUDHIANTORO
2017861007**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Dapat Mengikuti Ujian Sidang Tesis

Pembimbing Tunggal:

Dr. Theol. Leonardus Samosir, OSC

**PROGRAM MAGISTER ILMU TEOLOGI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
AGUSTUS 2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**PANGGILAN MEWUJUDKAN *BONUM COMMUNE*:
KETERLIBATAN KAUM AWAM KEUSKUPAN
BANDUNG DALAM BIDANG POLITIK**



Oleh:

**STEPHANUS AUGUSTA YUDHIANTORO
2017861007**

**Disetujui dalam Ujian Sidang pada Hari, Tanggal:
Rabu, 7 Agustus 2019**

Pembimbing Tunggal:

Dr. Theol. Leonardus Samosir, OSC

.....

Penguji I:

Onesius Otenieli Daeli, PhD.

.....

Penguji II:

Dr. Fransiskus Borgias

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Stephanus Augusta Yudhiantoro
Nomor Pokok Mahasiswa : 2017861007
Program Studi : Magister Ilmu Teologi
Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Parahyangan Bandung

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis dengan judul:

PANGGILAN MEWUJUDKAN *BONUM COMMUNE*: KETERLIBATAN KAUM AWAM KEUSKUPAN BANDUNG DALAM BIDANG POLITIK

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan pembimbing tunggal, **Dr. Theol. Leonardus Samosir, OSC** dan saya tidak melakukan penjiplakan atau mengutip dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala risiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan di : Bandung

Tanggal : 1 Agustus 2019

Stephanus Augusta Yudhiantoro

**PANGGILAN MEWUJUDKAN *BONUM COMMUNE*:
KETERLIBATAN KAUM AWAM KEUSKUPAN BANDUNG
DALAM BIDANG POLITIK**

Stephanus Augusta Yudhiantoro (NPM: 2017861007)

Pembimbing: Dr. theol. Leonardus Samosir, OSC

Magister Ilmu Teologi

Program Pasca Sarjana

Universitas Katolik Parahyangan

Bandung

Agustus 2019

ABSTRAK

Keterlibatan kaum awam Katolik dalam dunia politik sangatlah penting. Pertama, dengan terlibat dalam dunia politik kaum awam mampu menyalurkan aspirasinya bagi kebaikan serta kemajuan bangsa dan negara. Kedua, kaum awam mampu mewujudkan panggilan hidupnya sebagai pewarta Injil bagi keselamatan dunia. Namun, ada tendensi bahwa kaum awam Katolik tidak tertarik terjun ke dalam dunia politik. Hal ini didasarkan pada pandangan umum yang mengatakan bahwa politik itu kotor. Selain itu, ada juga awam yang merasa tidak memiliki kompetensi untuk bersaing dan terlibat dalam dunia politik. Oleh sebab itu, tujuan tesis ini ialah memotivasi kaum awam untuk berani terlibat dalam dunia politik serta membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan sehingga dengan demikian mereka membuktikan bahwa politik itu baik. Untuk mendapatkan dan mengolah data, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang di dalamnya terdapat wawancara terhadap beberapa informan, observasi, dan kajian pustaka. Akhirnya, melalui tesis ini penulis berkesimpulan bahwa kaum awam mestinya tidak takut terlibat dalam politik praktis karena dengan cara itu mereka memperjuangkan *bonum commune* bagi masyarakat.

Kata Kunci: Keterlibatan, kaum awam, politik, *bonum commune*, moralitas, kompetensi

**A VOCATION TO REALIZE *BONUM COMMUNE*:
THE PARTICIPATION OF THE LAITY OF THE DIOCES OF
BANDUNG IN POLITICS**

Stephanus Augusta Yudhiantoro (2017861007)

Advisor: Dr. theol. Leonardus Samosir, OSC

Magister of Theology

Bandung

August 2019

ABSTRACT

The participation of the laity in politics is very important. First, by participating in politics, the laities are able to articulate their aspirations for the common good of nation and state. Second, the laities are able to live out their vocation as servants of the Gospel for the salvation of the world. Unfortunately, there is a tendency that the laities are not interested in partaking in politics. This statement is based on general opinion that politics is dirty. Aside of it, there are some laities feel that they have no such competencies to compete and involve in politics. Therefore, the aim of this thesis is to encourage the laity to bravely participate in politics and learn as much as possible about it, so that they can prove that the politics is good. The author uses the qualitative research methodology to collect some data and analyze them. In that methodology there are some methods which include informant interviews, observations, and review of literatures. Finally, through this thesis, the author concludes that laities are called to involve in politics because by participating in it they are able to represent *bonum commune* (common good) for people.

Keyword: Participation, laity, politics, *bonum commune*, morality, competence

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah karena melalui segala rahmat dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **PANGGILAN MEWUJUDKAN *BONUM COMMUNE*: KETERLIBATAN KAUM AWAM KEUSKUPAN BANDUNG DALAM BIDANG POLITIK**. Atas bimbingan-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Tulisan ini dimaksudkan untuk semakin menyadari pentingnya keterlibatan kaum awam dalam politik. Kaum awam sebagai seorang beriman dipanggil untuk mewujudkan imannya melalui berbagai usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam berbagai persoalan kehidupan politik, dibutuhkan kaum awam yang mau terlibat secara aktif mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, keterlibatan kaum awam pun perlu dasari oleh iman dan terwujud dalam integritas moral dan kompetensi berpolitik.

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis sadar bahwa penulisan tesis ini dapat berjalan dengan baik karena dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin berterima kasih kepada:

- a. Dr. Theol. Leonardus Samosir, OSC selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar menyediakan waktu untuk memberikan dukungan, koreksi dan tambahan sumber-sumber referensi bagi penulis selama proses pengerjaan tesis ini.
- b. Dr. Onesius Otenieli Daeli dan Dr. Fransiskus Borgias selaku dosen penguji yang telah mengoreksi dan memberikan masukan melalui kritik dan saran dalam proses pengerjaan tesis ini.

- c. Rm. R.F. Bhanu Viktorahadi sebagai Rektor Seminari Tinggi, St. Yohanes Pembaptis, Fermentum, Rm. Sunu, Rm. Herry, Rm. Martin sebagai staf formator, yang mendukung dan menyemangati penulis agar segera menyelesaikan tulisan ini dengan tepat waktu.
- d. Keluarga (Bpk. L. Eko Susanto, Ibu. Anastasia Sutarni, Mas Yudha dan Eghi) yang senantiasa mendoakan penulis dalam setiap proses yang penulis jalani hingga saat ini.
- e. Kelima teman angkatan (Tony, Tian, Gatot, Kostka, Elmon) yang sama-sama berjuang dan saling mendukung agar penulisan tesis dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- f. Keluarga besar Seminari Tinggi Fermentum : teman-teman Unit Filipus (15), Unit Nazaret (17), Unit Yakobus (18), Unit Thomas (19).
- g. Semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penulisan tesis ini melalui doa, sapaan, koreksi, dan saran yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih membutuhkan saran dan koreksi. Ada beberapa inspirasi dan pandangan ke depan yang masih perlu dikembangkan agar keterlibatan kaum awam dalam bidang politik sungguh menarah kepada kesejahteraan bersama.

Bandung, 5 Agustus 2019

Stephanus Augusta Yudhiantoro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR SINGKATAN..... vi

BAB 1: PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Penulisan..... 1

1.2. Rumusan Masalah..... 8

1.3. Pembatasan Masalah..... 10

1.4. Tujuan Penulisan..... 11

1.5. Metodologi Penelitian..... 11

1.6. Sistematika Penulisan 13

BAB 2 : PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KAUM AWAM

DALAM BIDANG POLITIK..... 15

2.1 Identitas Kaum Awam dalam Gereja..... 15

2.1.1 Kedudukan Kaum Awam dalam Gereja..... 15

2.1.2 Peranan Kaum Awam dalam Dunia..... 19

2.2 Kaum Awam Terlibat dalam Politik..... 20

2.2.1	Menimba Sikap dari Hidup Yesus	20
2.2.2	Berpolitik Sebagai Bagian Perwujudan Iman	22
2.3	Tanggung Jawab Kaum Awam dalam Politik.....	24
2.3.1	Meluhurkan Martabat Manusia	25
2.3.2	Menegakkan Perdamaian, Keadilan, dan Kejujuran	29
2.3.3	Terlibat Mewujudkan <i>Bonum Commune</i>	31
2.3.4	Sadar Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara	33
 BAB 3: PROBLEMATIKA BERPOLITIK DI INDONESIA.....		37
3.1.	Momen Kritis Demokrasi Indonesia	38
3.2.	Politik Kekuasaan	42
3.3.	Melemahnya Kinerja Partai Politik.....	45
3.4.	Maraknya Politik Uang	48
3.5.	Melemahnya Penghayatan Pancasila	52
3.6.	Politisasi SARA	55
3.7.	Politik Pasca Kebenaran.....	58
 BAB 4: PANGGILAN BERPOLITIK KAUM AWAM KEUSKUPAN BANDUNG		63
4.1.	Gereja Keuskupan Bandung yang Terlibat dalam Bidang Politik	64
4.2.	Bentuk Keterlibatan Kaum Awam dalam Politik.....	70
4.3.	Panggilan Berpolitik Kaum Awam Keuskupan Bandung.....	72
4.3.1	Alergi Terhadap Politik.....	75
4.3.2	Terlibat untuk Mempengaruhi Urusan Publik	78

4.3.3 Tanggung Jawab untuk Mewujudkan Kesejahteraan Bersama	81
4.3.4 Tantangan dalam Berpolitik.....	84
4.3.5 Nilai Lebih Keterlibatan Kaum Awam dalam Politik.....	90
BAB 5 : PENUTUP	93
5.1 Simpulan	93
5.2 Rekomendasi Pastoral	98
DAFTAR PUSTAKA	105
DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN	111
RIWAYAT HIDUP	112

DAFTAR SINGKATAN

Kitab Suci

Kej	Kejadian
Kel	Keluaran
Ul	Ulangan
Yes	Yesaya
Yer	Yeremia
Mat	Matius
Mrk	Markus
Luk	Lukas
Yoh	Yohanes
1 Kor	Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus
Rm	Roma
1 Ptr	Surat Pertama Rasul Petrus
Ef	Efesus
Kol	Kolose
Yak	Yakobus

Dokumen Gereja

AA	Apostolicam Actuositatem
GS	Gaudium et Spes
EG	Evangelii Gaudium
LG	Lumen Gentium

Lain-Lain

Lih	Lihat
Bdk	Bandingkan
Pemilu	Pemilihan Umum
Pilkada	Pemilihan Kepada Daerah
Pileg	Pemilihan Legislatif
Bawaslu	Badan Pengawas Pemilihan Umum
Muspas	Musyawaharah Pastoral
Caleg	Calon Legislatif
Perda	Peraturan Daerah
Nasdem	Nasional Demokrat
SARA	Suku, Ras, Agama dan Antar-Golongan
ABRI	Angkatan Bersenjata Indonesia
TNI	Tentara Nasional Indonesia
HAM	Hak Asasi Manusia
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
UUD	Undang-Undang Dasar
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPP	Dewan Pimpinan Pusat
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
KNPI	Komite Nasional Pemuda Indonesia
PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Kehidupan manusia tidak terlepas dari politik. Hal ini ditandai dengan berbagai kebijakan politis yang sangat mempengaruhi situasi sosial, ekonomi, hukum, budaya, ras, ideologi, dan bahkan agama di masyarakat.¹ Pada dasarnya kebijakan politis tersebut dapat membawa pengaruh positif apabila politik dihayati sebagai sarana untuk menata kehidupan sosial dengan terwujudnya kesejahteraan bersama (*bonum commune*). Akan tetapi, kebijakan politik dapat berpengaruh negatif apabila politik hanya didasari oleh kepentingan pribadi atau kelompok untuk mencapai kekuasaan. Bahkan, praktik politik yang tidak memihak pada keadilan dan kedamaian dapat menyebabkan krisis-krisis sosial, yaitu: perang, kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kesemerawutan tata hidup.²

Di tengah pengaruh kehidupan politik tersebut, Gereja wajib untuk menyadari diri berada di dunia dan diutus untuk terlibat dalam menata urusan dunia. Semangat pembaharuan diri Gereja sejak Konsili Vatikan II menegaskan bahwa Gereja perlu disadari sebagai *communio*, yakni tanda persatuan dengan Allah dan kesatuan seluruh umat (Hirarki dan Awam). Dalam semangat *communio* itulah, Gereja tidak boleh menutup mata terhadap atau hanya mengutuki dunia dengan segala keadaannya. Sebaliknya, Gereja termasuk semua

¹ William Chang, *Gereja dan Politik*, dalam Eddy Kristiyanto (ed.), *Semakin Mengindonesia: 50 Tahun Hierarki*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 340.

² T. Krispurwana Cahyadi, *Katolik dan Politik*, (Jakarta: Obor, 2006), hlm. 56.

anggotanya pertama-tama diutus untukewartakan Kristus dan menyalurkan rahmat-Nya kepada dunia dengan kata-kata maupun perbuatan (Mat 5:16).³

Dalam perutusannya, kaum hirarkiewartakan Kristus melalui pelayanan sabda dan sakramen-sakramen. Sedangkan, kaum awam memiliki peran sebagai ‘rekan pekerja demi kebenaran’ (3 Yoh: 8).⁴ Peran yang dilakukan kaum awam ialah melaksanakan kerasulan untukewartakan Injil dan pengudusan lewat kata-kata dan perbuatan mereka di tengah masyarakat, khususnya dalam membela hak asas-asas kristiani dan menerapkan dalam kehidupan konkret.⁵ Dengan begitu, peran awam dimaksudkan supaya awam terus-menerus menata dunia menjadi dunia yang lebih baik dengan semangat injili.

Peran kaum awam dalam menjalankan perutusan sangatlah penting karena sungguh melaksanakan hakikat perutusan Gereja di tengah dunia. Berbagai bidang kerasulan kaum awam amatlah beragam. Seperti halnya, kerasulan dalam, “jemaat-jemaat gerejawi, keluarga, kaum muda, hingga lingkungan sosial, politik, tata nasional dan internasional.”⁶

Secara khusus, tulisan ini membahas mengenai keterlibatan kaum awam di bidang politik. Peran kaum awam di bidang politik ingin menegaskan bahwa kaum awam dipanggil untukewartakan Injil dengan menjalankan tugas perutusan sebagai garda depan Gereja yang membawa terang bagi dunia (Mat 5: 13-16). Untuk itu, kaum awam dipanggil untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik. Keterlibatan yang diharapkan tentu bukan hanya sekedar menjadi

³ Konsili Vatikan II, *Dekrit tentang Kerasulan Awam* (Apostolicam Actuositatem) dalam Dokumen Konsili Vatikan II, (Jakarta: Obor, 1993), art 6. Selanjutnya disingkat AA.

⁴ *Ibid.*

⁵ Lih. A.B Sinaga, *Apostolicam Actuositatem: Menalar Kerasulan Awam*, dalam Komisi Teologi KWI, *Kompendium Konsili Vatikan II*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 168.

⁶ Lih. AA, art. 9.

penonton dan pelaksana kebijakan politis. Tetapi, kaum awam diutus untuk menggarani dunia perpolitikan dengan terlibat aktif mewujudkan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks Gereja dan politik, keterlibatan Gereja dimulai dan ditandai dengan seruan dari pemimpin Gereja tentang usaha untuk menata tatanan kehidupan politik agar lebih adil dan manusiawi. Hal ini ditunjukkan oleh Paus Fransiskus dalam audiensi dengan kelompok *Christian Life Community* di Vatikan, 30 April 2015. Dalam audiensi tersebut, Paus menegaskan pentingnya warga Gereja terlibat dalam politik. Sebab, seperti yang dikatakan Beato Paus Paulus VI, “Politik adalah wujud tertinggi dari cinta kasih karena politik tertuju pada pencapaian kesejahteraan umum.”⁷ Sejalan dengan semangat tersebut, Konferensi Waligereja Indonesia, melalui Nota Pastoral 2018 tentang *Panggilan Gereja dalam Hidup Berbangsa: Menjadi Gereja yang Relevan dan Signifikan* no. 23 menegaskan,

“Keterlibatan dalam bidang politik merupakan wujud tanggung jawab moral dalam kehidupan bersama. Partisipasi warga Gereja dalam berpolitik menjadi suara hati bagi dunia dan menjadi tanda perekat dan pemersatu dengan memperjuangkan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai spirit dasar dan pedoman etis-moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.”

Pada dasarnya politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*).⁸ Dalam ruang lingkup negara, politik digunakan untuk menjaga kepentingan semua pihak. Politik pun semestinya dilaksanakan secara bermoral dan bertanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat, bukan kesejahteraan pribadi. Ukurannya

⁷ Nota Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia 2018, *Panggilan Gereja dalam Hidup Berbangsa: Menjadi Gereja yang Relevan dan Signifikan*, No. 22.

⁸ Lih. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 8.

ialah adanya kesejahteraan bersama (*Bonum Commune*). Akan tetapi, dalam perjalanan waktu, situasi politik di Indonesia hingga saat ini masih ternodai dengan cara-cara yang bertentangan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

Beberapa persoalan yang saat ini menjadi situasi konkret kehidupan politik di Indonesia ialah upaya untuk mencapai kekuasaan melalui politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Penggunaan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) kembali menguat dalam Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Mochamad Afifuddin, Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) memperlihatkan bahwa Politik SARA berkembang dalam Pilkada serentak tahun 2018. Politik SARA menjadi masif dan menyebar ke ruang publik karena diproduksi dan dikapitalisasi oleh elite politik seperti konsultan politik, anggota partai politik, tim sukses dan elite organisasi masyarakat tertentu sehingga memberikan dampak ketegangan sosial di masyarakat.⁹

Dalam praktiknya, politik SARA merujuk pada upaya-upaya penyesatan opini, dan penggiringan pilihan politik atas dasar sentimen etnis, agama, dan ideologi tanpa fakta. Politik SARA menjadi pengaruh desktruktif yang masih terjadi dengan menegasi faktor integritas, kapabilitas dan penilaian kerja. Dalam situasi demikian, Politik SARA membuat masyarakat mengalami defisit demokrasi. Nilai-nilai kewargaan (*civic values*) tergerus sehingga terjangkiti perilaku politik tidak beradab. Ray Rangkuti, Pengamat Politik dari Lingkaran Madani menyatakan bahwa politik SARA dapat mematikan nalar kompetisi

⁹ Juliaman Saragih (ed.), *Mengawal Demokrasi, Menolak Politik SARA, Merawat Kebhinekaan*, (Jakarta: NCBI dan Cultura Di Vita, 2018), hlm. 56.

pemilihan umum, di mana perdebatan justru jauh dari hal yang substantif seperti visi misi calon yang akan dipilih.¹⁰

Situasi terkait isu sosial dan politik tersebut semakin menyebar di masyarakat. Survei yang dirilis oleh Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel Indonesia) pada tahun 2017 memperlihatkan bahwa topik disinformasi atau kabar bohong yang paling tersebar dalam masyarakat adalah informasi terkait isu sosial dan politik. Sebanyak 91.80 % dari total 1.116 responden tercatat pernah menerima disinformasi terkait isu sosial politik. Sedangkan, disinformasi terkait SARA sebesar 88.60 %.¹¹ Dengan data tersebut, tidak dapat disangkal bahwa cara-cara kotor dalam praktik politik terjadi dengan adanya ketidakjujuran. Lebih parah lagi bahwa praktik berpolitik yang kotor dapat mengancam kesatuan bangsa. Masyarakat selalu disajikan oleh berbagai ancaman dan berita bohong yang menakutkan sehingga pengerasan identitas terjadi di kelompok-kelompok masyarakat.

Situasi tersebut dipertegas dengan munculnya kelompok-kelompok yang secara demonstratif memperlihatkan sikap dan gerakan menentang Pancasila. Salah satunya adalah menguatnya gerakan intoleransi dan eksklusivisme agama, serta terabaikannya Pancasila sebagai Dasar Negara. Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudi Latif memaparkan bahwa situasi penghayatan Pancasila diwarnai dengan arus globalisasi membawa kontestasi nilai (ideologi) dan kepentingan yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas. Gejala polarisasi dan fragmentasi sosial baik berbasis identitas

¹⁰ Juliaman Saragih (ed.), *Mengawal Demokrasi, Menolak Politik SARA, Merawat Kebhinekaan*, hlm. 51.

¹¹ *Ibid.*

keagamaan, kesukuan, golongan dan kelas-kelas sosial semakin menguat. Selain itu, Indonesia sebagai masyarakat plural kurang mengembangkan wawasan dan praktik-praktik pembelajaran multikulturisme.¹² Bahkan, terdapat pemimpin yang membiarkan kelompok-kelompok penekan menggerogoti sendi-sendi kehidupan bersama. Seperti halnya, ujaran kebencian, konflik horizontal dan gerakan radikal.¹³ Oleh karena itu, keterlibatan dalam hidup politik pada dasarnya masih memerlukan Pancasila sebagai dasar untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dengan berbagai persoalan tersebut, keterlibatan Gereja dalam bidang politik semestinya menjadi tanda nyata adanya warta kabar gembira bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterlibatan dalam bidang politik merupakan ciri khas kaum awam untuk menyebarkan kasih Allah melalui perwujudan iman akan Kristus yang datang membawa pembebasan.¹⁴ Untuk itu, kaum awam perlu menghayati dan mewujudkan iman akan Kristus dalam keterlibatannya di politik dengan memperjuangkan *bonum commune*.

Keterlibatan Gereja hendaknya mendasari kembali perutusannya melalui tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia yang telah memperlihatkan kehadiran Gereja di Indonesia yang bercorak awami. Sejumlah contoh kaum awam telah menjadi bukti tentang adanya pribadi yang gigih, kreatif di tengah keterbatasan, yang bertekun dalam mencintai, mengungkapkan dan mewujudkan iman. Sepertihalnya, Barnabas Sarikrama yang memperoleh Bintang Kepausan,

¹² Lih. Juliaman Saragih (ed.), *Mengawal Demokrasi, Menolak Politik SARA, Merawat Kebhinekaan*, hlm. 19.

¹³ Nota Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia 2018, *Panggilan Gereja dalam Hidup Berbangsa: Menjadi Gereja yang relevan dan signifikan*, No. 23.

¹⁴ T. Krispurwana Cahyadi, *Katolik dan Politik*, hlm. xvi.

I.J Kasimo Hendrowahyono, Agustinus Adisoetjipto, Yos Soedarso dan Ludovicus Doewe Prawiradisastra. Kehadiran dan keterlibatan awam ini tidak dapat dilepaskan dari peran hirarki yang sungguh menggembalakan umat-Nya dengan sepenuh hati. Namun, perlu disadari bahwa kehadiran dan keterlibatan awam menghadapi bahaya *clerics oriented* yang memusatkan aktivitas dan pelayanan gerejawi pada fungsi dan peran imam. Dengan demikian, klerikalisasi menjadi suatu kenyataan yang perlu disikapi secara arif dan kritis.¹⁵

Dari berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi kaum awam dalam keterlibatannya di bidang politik, Gereja Keuskupan Bandung menyadari pula bahwa kaum awam di Keuskupan Bandung tidak banyak terlibat dalam aktivitas sosial dan politik.¹⁶ Hal ini ditegaskan melalui jumlah perwakilan awam yang terlibat dalam parlemen sebanyak 1 orang di DPRD tingkat I Jawa Barat, 1 orang di DPR RI, dan tidak ada perwakilan awam yang terlibat di DPRD tingkat II Kotamadya dan Kabupaten Bandung. Sedangkan, awam yang terlibat di partai politik sebanyak 3 orang.¹⁷

Melalui situasi tersebut, Sinode 2015 Gereja Keuskupan Bandung menetapkan Kebijakan Pastoral no.18, “Gereja yang senantiasa mau terlibat aktif dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, *bonum commune*.” Semangat ini ditunjukkan oleh Gereja Keuskupan Bandung dengan terus-menerus meningkatkan kesadaran dan kepedulian hidup bermasyarakat, berbangsa, dan

¹⁵ A. Eddy Kristiyanto, *Seandainya Indonesia Tanpa Katolik*, (Jakarta: Obor, 2015), hlm. xxxvi.

¹⁶ Dalam Sensus Umat Katolik Keuskupan Bandung 2011 ditampilkan data bahwa hanya 9.812 (11,2 %) anggota rumah tangga Katolik yang mengaku terlibat dalam kegiatan di masyarakat. Berdasarkan data tersebut memperlihatkan bahwa umat Keuskupan Bandung belum banyak terlibat dalam dinamisasi masyarakat yang lebih luas di Jawa Barat. Lih. Tim Sensus Umat Katolik Keuskupan Bandung 2011, *Sensus Umat Katolik Keuskupan Bandung 2011*, (Keuskupan Bandung, 2012), hlm. 94.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Pastor Serafim Dany Sanusi, Ketua Komisi Kerawam Keuskupan Bandung pada Selasa, 12 Maret 2018.

bernegara sehingga kehadirannya menjadi perjumpaan yang meneguhkan dan penuh sukacita.

Perutusan Gereja untukewartakan kabar gembira pada akhirnya perlu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Politik sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan bersama menjadi ladang yang strategis bagi kerasulan awam. Kaum awam dipanggil untuk terlibat aktif dalam politik. Dibutuhkan pula kesadaran agar kaum awam untuk tidak perlu takut dan alergi untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Politik perlu dihayati sebagai jalan untuk menata, menguduskan dunia danewartakan kabar gembira melalui kepedulian memperjuangkan kesejahteraan bersama.

1.2 Rumusan Masalah

Kaum awam dipanggil dan diutus untukewartakan kabar gembira dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu medan perutusannya ialah bidang politik. Tugas tersebut merupakan wujud nyata dari perutusan Gereja yang secara khusus menganugerahkan diri kaum awam untuk terlibat sebagai bagian integral dari masyarakat dan menyadari bahwa keterlibatan tersebut didasari oleh kesadaran mengenai kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan masyarakat merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan kaum awam juga.¹⁸ Oleh karena itu, dalam berbagai situasi kehidupan politik, kaum awam perlu terlibat aktif di masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

¹⁸ Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral Tentang Gereja di Dunia Saat Ini*, (Gaudium et Spes) dalam Dokumen Konsili Vatikan II, (Jakarta: Obor, 1993), art 1. Selanjutnya disingkat GS.

Namun, keterlibatan kaum awam dalam bidang politik ini sangatlah problematis. Terdapat tendensi bahwa kaum awam tidak tertarik untuk aktif dalam bidang politik. Faktor penyebab ketidaktertarikan itu ialah pandangan bahwa politik itu kotor.¹⁹ Pandangan politik yang kotor tersebut ditandai oleh karena maraknya praktik para politikus yang tidak berpolitik etis. Hal ini tampak dengan adanya kepentingan pribadi atau kelompok untuk mencari keuntungan, praktik mencapai kekuasaan dengan menggunakan isu SARA, korupsi, berita bohong maupun ujaran kebencian.

Selain itu, hal yang menyebabkan kaum awam tidak tertarik untuk aktif dalam bidang politik ditandai juga dengan tidak adanya kesadaran dan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan publik demi terwujudnya *bonum commune*.²⁰ Bahkan, kehadiran kaum awam hanya dipandang sebatas penonton dan pelaksana kebijakan pemerintah. Kesadaran bahwa kehidupan manusia selalu terkait dalam ranah kebijakan politis pun masih rendah. Hal ini tampak dalam keterlibatan awam yang tidak terlihat di dalam penerapan nilai-nilai kristiani di dalam sektor sosial maupun politik.²¹

Berdasarkan kondisi itulah, inti permasalahannya dapat dikatakan bahwa kaum awam tidak tertarik untuk terlibat dalam politik karena praktik politik itu kotor dan tidak adanya kompetensi dari dalam diri kaum awam untuk berpolitik.

¹⁹ T. Krispurwana Cahyadi, *Katolik dan Politik*, hlm. xvii.

²⁰ Dokumen Kongregasi Ajaran Iman Vatikan, *Doctrinal note on some questions regarding the participation of Catholics in political life*, mengemukakan bahwa dalam keterlibatan umat Katolik di bidang politik terdapat sebuah keprihatinan bahwa para politisi Katolik seringkali tidak membela ajaran iman Katolik saat membuat kebijakan publik. Politisi Katolik justru terlibat dalam pengesahan perundang-undangan mengenai aborsi, euthanasia, homoseksual, dan persoalan etis lainnya. Bdk. *Ibid.*, hlm. 61.

²¹ Paus Fransiskus, *Evangelii Gaudium, Sukacita Injil*, (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan Konfrensi Waligereja Indonesia, 2014), art. 102.

Dengan permasalahan tersebut, penulis memandang bahwa keterlibatan kaum awam dalam politik pada dasarnya sangat dibutuhkan untuk menata dan menggarami dunia dengan nilai-nilai yang diwartakan oleh Yesus Kristus. Panggilan untuk terlibat di dalam kehidupan politik menegaskan juga bahwa politik merupakan jalan bagi Yesus Kristus untuk hadir dan berkarya dalam sejarah keselamatan hidup manusia. Bagi manusia, politik merupakan jalan bagi manusia untuk menangkap, memahami, mengakui dan mewujudkan kehendak dan karya Yesus Kristus tersebut. Berpolitik menegaskan bahwa kaum awam bertindak memperjuangkan kesejahteraan bersama dengan jiwa dan semangat Yesus yang datang untuk melayani bahkan menyerahkan nyawa untuk manusia. Oleh karena itu, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan: Bagaimana seharusnya kaum awam mewartakan Yesus Kristus dalam situasi di bidang politik saat ini?

1.3 Pembatasan Masalah

Ruang lingkup pembahasan dalam tesis ini adalah keterlibatan kaum awam Keuskupan Bandung di bidang politik. Konteks keterlibatan kaum awam Keuskupan Bandung dipilih karena terjangkau dan mudah diakses. Batasan subjek penelitiannya ialah kaum awam Keuskupan Bandung yang terlibat aktif, memiliki perhatian maupun yang tidak berminat dalam bidang politik. Subjek penelitian meliputi kaum awam yang terlibat dalam politik praktis (anggota partai), calon legislatif, organisasi masyarakat, kepengurusan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) maupun pengamat politik. Selain itu, subjek penelitian juga mencakup kaum awam yang tidak mau terlibat aktif dalam politik, secara khusus politik praktis.

1. 4 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat dua tujuan penulisan tesis ini, yakni:

1. Kaum awam perlu terlibat dalam kehidupan politik. Keterlibatan kaum awam dalam politik perlu disadari sebagai jalan panggilan bagi kaum awam untukewartakan Kristus dengan ambil bagian dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama, *bonum commune*. Oleh karena itu, awam tidak perlu takut dan alergi terhadap politik. Kaum awam perlu menghayati tugas perutusannya untuk membersihkan, menata dan menguduskan dunia, menciptakan masyarakat yang adil, dan menjunjung tinggi martabat manusia.
2. Kaum awam semakin handal terlibat dalam politik. Berdasarkan berbagai pengalaman keterlibatan kaum awam menghadapi berbagai persoalan politik di Indonesia, kaum awam dapat semakin mengetahui kebutuhan mendesak yang diperlukan dalam keterlibatannya di politik. Untuk itu, perlunya pendampingan spiritual, moral, wawasan ataupun kompetensi, dan usaha berjejaring dengan pihak lain yang berkehendak baik untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dapat memberi sumbangan positif bagi keterlibatan kaum awam dalam menjalankan perutusannya di bidang politik.

1. 5 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan bentuk observasi, wawancara dan metode studi kepustakaan. Metode ini dimaksudkan untuk membangun kerangka berfikir kritis dan komprehensif tentang keterlibatan kaum awam dalam bidang politik.

Selain itu, studi kepustakaan didukung dengan sumber utama melalui dokumen-dokumen Gereja, yakni: *Apostolicam Actuositatem, Lumen Gentium, Gaudium et Spes*, dan Seruan Apostolik *Evangelii Gaudium*. Selain itu, sumber penyusunan juga didukung oleh Hasil Sinode Keuskupan Bandung 2015 tentang keterlibatan dalam masyarakat, *Rancang Bersama Awam dan Klerus, Etika Politik, Sakramen Politik, Katolik dan Politik, Kerasulan Politik – Panggilan dan Perutusan Umat Katolik, Jesus Politics and Society* dan berbagai sumbangan pemikiran teologi modern dalam *Public Theology for 21st Century: Essays in Honour of Duncan N Forrester*.

Selain itu, tulisan ini juga menggunakan Studi Lapangan, yakni wawancara dengan kaum awam yang terlibat aktif dan memiliki perhatian di bidang politik. Narasumber yang dimaksud ialah kaum awam Keuskupan Bandung yang terlibat aktif dan memiliki perhatian dalam bidang politik. Seperti halnya, keterlibatan dalam jabatan politik, partai politik dan organisasi masyarakat, pengurus RT dan RW dan pengamat di bidang politik. Narasumber tersebut juga merupakan kaum awam yang terlibat di dalam Komisi Kerasulan Awam, Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan, maupun anggota partai politik dan anggota Pemilihan Legislatif 2019. Studi lapangan ini dimaksudkan untuk mengetahui secara jelas tentang situasi aktual keterlibatan kaum awam Keuskupan Bandung di bidang politik.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam tesis ini, sistematika penulisan terbagi ke dalam lima bab yang akan menjelaskan suatu pembahasan gagasan secara komprehensif.

1. Bab 1 merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penulisan, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, metodologi dan sistematika penulisan. Bab ini ditunjukkan sebagai upaya menjelaskan situasi awal permasalahan dan gerak pemikiran yang harus diselesaikan dengan telaah komperhensif.
2. Bab 2 menjelaskan peran dan tanggung jawab awam dalam politik. Penjelasan dalam bab ini terkait erat dengan kedudukan awam di dalam Gereja serta tanggung jawab awam dalam dunia politik. Pembahasan bab ini didasari oleh landasan biblis, dokumen-dokumen Gereja maupun Hasil Sinode 2015 Keuskupan Bandung. Selain itu, sumbangan dari usaha kontekstualisasi teologi modern juga mempertegas pembahasan mengenai keterlibatan awam dalam dunia politik.
3. Bab 3 mengetengahkan pembahasan mengenai gambaran situasi konkret politik di Indonesia sekarang ini. Gambaran situasi konkret menjelaskan pandangan, peluang dan tantangan politik di Indonesia. Hal tersebut diperoleh dari studi pustaka, pengamatan dan wawancara. Dengan mengetahui dan memetakan situasi konkret politik saat ini, langkah tersebut dimaksudkan untuk memberikan arahan yang tepat bagi keterlibatan kaum awam di bidang politik.
4. Bab 4 memaparkan tinjauan atas apa yang sudah dikerjakan kaum awam Keuskupan Bandung dalam keterlibatannya bidang politik. Selain itu, bab ini menjabarkan pula hasil pengamatan dan wawancara serta analisa tentang

panggilan kaum awam yang terlibat dalam bidang politik. Analisa dalam bab ini dimaksudkan untuk semakin mengetahui bagaimana seharusnya kaum awam terlibat dalam kehidupan politik di saat ini.

5. Bab 5, kesimpulan bab ini memberikan penegasan bahwa kaum awam perlu terlibat dalam kehidupan politik sebagai bentuk panggilan mewujudkan kesejahteraan bersama. Selain itu, bab ini juga memberikan rekomendasi bagi kaum awam untuk dapat semakin handal terlibat aktif dalam politik. Rekomendasi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pendampingan bagi kaum awam untuk terlibat dalam bidang politik.